

# KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJARBARU SEBELUM DAN SESUDAH MENJADI IBU KOTA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

VINA AZHARISKA  
NPP. 31.0698

*Program Studi Keuangan Publik Fakultas Manajemen Pemerintahan*  
email : azhariskavina@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Drs. H. Maisondra, SH, MH, M.Pd, Dipl.Ed, M.A.P.

## ABSTRACT

**Background (GAP):** Regional government financial performance is crucial for achieving development goals and community welfare. This study focuses on analyzing the financial performance of Banjarbaru City before and after becoming the capital of South Kalimantan Province from 2019 to 2023. **Objective:** This research aims to assess the financial performance of Banjarbaru City's regional government, identify factors inhibiting its performance, and evaluate government efforts to enhance financial management. **Method:** The study employs a qualitative approach with descriptive methods and an inductive thinking framework. Financial ratio analysis, based on Mahmudi's theory, includes indicators such as the degree of decentralization ratio, regional financial dependency ratio, regional financial independence ratio, and regional original income effectiveness ratio. **Results/Findings:** The analysis reveals that the degree of decentralization ratio in Banjarbaru City is categorized as sufficient (20.01%-30.00%). The regional financial dependency ratio indicates a very high dependency (more than 50%), while the regional financial independence ratio shows a consultative relationship pattern (25-50%). Management effectiveness of local revenue is classified as very effective (>100%). **Conclusion:** Efforts to optimize Own Source Revenue (PAD) and regional levy revenues are recommended to improve financial performance. Strategies include intensifying and expanding legitimate PAD sources and optimizing regional levy collection mechanisms.

**Keywords:** Financial Analysis, Performance, Ratios

## ABSTRAK

**Latar Belakang (GAP):** Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah hal penting untuk mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Studi ini berfokus pada analisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru sebelum dan sesudah menjadi Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan dari tahun anggaran 2019 hingga 2023. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Banjarbaru, mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat kinerjanya, dan mengevaluasi upaya pemerintah untuk meningkatkan pengelolaan keuangan. **Metode:** Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan kerangka berpikir induktif. Analisis rasio keuangan berdasarkan teori Mahmudi meliputi rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, dan rasio

efektivitas pendapatan asli daerah (PAD). **Hasil/Temuan:** Analisis menunjukkan bahwa rasio derajat desentralisasi di Kota Banjarbaru dikategorikan sebagai cukup (20,01%-30,00%). Rasio ketergantungan keuangan daerah menunjukkan tingkat ketergantungan yang sangat tinggi (lebih dari 50%), sementara rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan pola hubungan konsultatif (25%-50%). Efektivitas pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) tergolong sangat efektif (>100%). **Kesimpulan:** Untuk meningkatkan kinerja keuangan, disarankan untuk mengoptimalkan penerimaan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber PAD yang sah, serta mengoptimalkan penerimaan retribusi daerah.

**Kata Kunci:** Analisis, Kinerja, Rasio Keuangan

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Keuangan daerah memiliki peran krusial dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (1). Konsep otonomi daerah menekankan bahwa setiap pemerintahan daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, memiliki hak untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan regional. Di Indonesia, prinsip desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Desentralisasi memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya berdasarkan aspirasi lokal tanpa tergantung pada keputusan pusat (Nurhaeda & Tenriola, 2022).

Desentralisasi dalam konteks fiskal, administrasi, dan politik menjadi landasan utama bagi pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan menyediakan pelayanan publik yang efektif. Desentralisasi fiskal, khususnya, memungkinkan alokasi anggaran dari pemerintah pusat ke daerah untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan yang dilimpahkan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sumber utama bagi pemerintah daerah dalam membiayai program-program pembangunan lokal, yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap transfer anggaran dari pemerintah pusat (Pradana & Handayani, 2023).

Namun demikian, ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat juga menjadi tantangan tersendiri bagi otonomi daerah. Pemerintah daerah perlu mengelola keuangan secara bijaksana untuk memastikan pendapatan daerah mencukupi untuk membiayai operasional dan pembangunan lokal. Pengelolaan yang baik dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah, yang tercermin dalam efisiensi penggunaan anggaran dan peningkatan pendapatan dari berbagai sumber, termasuk retribusi daerah dan pengelolaan aset secara optimal (Putri & Darmayanti, 2019).

Dalam konteks Kota Banjarbaru, sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan, kebijakan desentralisasi fiskal memainkan peran penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Kota ini mengalami perubahan signifikan setelah menjadi pusat administrasi provinsi, yang mempengaruhi

dinamika keuangan dan pengelolaan sumber daya secara keseluruhan. Analisis rasio keuangan seperti derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan daerah, kemandirian keuangan, dan efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi instrumen penting dalam mengukur kinerja keuangan Kota Banjarbaru sebelum dan sesudah menjadi Ibu Kota Provinsi.

Permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan kinerja keuangan antara lain meliputi kendala dalam pengelolaan sumber daya, tantangan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, dan upaya untuk mengurangi ketergantungan pada transfer anggaran dari pemerintah pusat. Upaya-upaya untuk memperbaiki kinerja keuangan daerah termasuk dalam optimalisasi pendapatan asli daerah melalui diversifikasi sumber pendapatan, peningkatan efisiensi pengelolaan anggaran, serta penguatan kapasitas manajerial dan administratif di tingkat lokal.

Dengan demikian, pemahaman mendalam terhadap mekanisme desentralisasi fiskal dan strategi pengelolaan keuangan daerah menjadi krusial bagi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsinya secara efektif. Langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah harus didukung oleh komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat lokal.

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil**

Kesenjangan masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah terkait dengan manajemen keuangan daerah di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Meskipun Kota Banjarbaru memiliki potensi sumber daya yang signifikan dan status sebagai ibu kota provinsi, namun masih terdapat tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah yang optimal. Masalah utama yang menjadi perhatian adalah ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, yang dapat menghambat kemampuan daerah untuk mandiri secara finansial dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan publik. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk lebih memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pendapatan utama yang dapat mendukung keberlanjutan keuangan daerah.

Selain itu, penelitian ini juga menyoroti masalah kurangnya diversifikasi sumber pendapatan daerah di Kota Banjarbaru. Meskipun potensi ekonomi dan sumber daya alam yang dimiliki, namun pendapatan daerah masih belum maksimal dalam memanfaatkan berbagai potensi yang ada. Hal ini menunjukkan perlunya strategi yang lebih efektif dalam mengelola dan mengoptimalkan sumber daya ekonomi yang ada di daerah ini, sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat dan meningkatkan keberlanjutan pembangunan daerah secara mandiri.

## **1.3 Penelitian Terdahulu**

Berikut adalah sepuluh penelitian terdahulu yang relevan dengan tema "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sebelum dan Selama Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Banjarbaru Tahun 2018-2021)":

1. **Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015-2017** Penelitian ini mengkaji kinerja keuangan daerah Kabupaten Tanah Bumbu sebelum pandemi Covid-19, dengan fokus pada rasio keuangan seperti kemandirian keuangan, efektivitas PAD, dan efisiensi keuangan. Hasilnya menunjukkan bahwa kabupaten ini menghadapi tantangan dalam mencapai kemandirian keuangan yang optimal namun efisiensi PAD yang relatif tinggi (Rizkyaturraudah & Syahdan, 2023).
2. **Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Kompetensi Guru terhadap Kinerja SMPN 4 Banjarbaru** Penelitian ini menjelaskan faktor-faktor internal yang mempengaruhi kinerja institusi pendidikan di Banjarbaru, mirip dengan pendekatan untuk mengidentifikasi faktor yang dapat memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Ini mencakup penilaian terhadap kompetensi, transparansi, dan akuntabilitas sebagai elemen kunci dalam meningkatkan kinerja (Fatimah, 2018).
3. **Strategi Pemasaran Lembaga Bimbingan Belajar di Banjarbaru** Meskipun fokusnya pada strategi pemasaran, penelitian ini memberikan perspektif yang berguna terkait dengan manajemen keuangan dan alokasi sumber daya dalam konteks organisasi, yang relevan dengan efisiensi pengelolaan keuangan daerah (Rizal & Paujiah, 2018).
4. **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Merangin** Studi ini menyoroti pentingnya faktor internal seperti budaya organisasi, kompetensi aparatur, dan pengelolaan keuangan dalam mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah, memberikan wawasan tentang bagaimana faktor-faktor ini mungkin berlaku di konteks Tanah Bumbu dan Banjarbaru (Jumiati & Humaidi, 2019).
5. **Determinan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Jambi** Penelitian ini mengkaji pengaruh variabel seperti pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jambi, yang dapat memberikan perbandingan dalam konteks manajemen keuangan daerah antara provinsi dan kabupaten/kota (Nurarifah et al., 2023).
6. **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Daerah** Studi ini menggali dampak pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan daerah, serupa dengan penelitian yang diarahkan pada aspek-aspek keuangan yang relevan dengan Tanah Bumbu dan Banjarbaru (Amin Insani et al., 2023).
7. **Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018-2021** Penelitian ini secara spesifik mengevaluasi kinerja keuangan daerah Kabupaten Tanah Bumbu selama periode yang mencakup masa pandemi Covid-19, memberikan perspektif tentang adaptasi kebijakan keuangan daerah dalam menghadapi tantangan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi (Antari & Sedana, 2018).
8. **Pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap APBD di Pemerintah Daerah** Penelitian ini memeriksa dampak langsung pandemi Covid-19 terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), termasuk perubahan yang dilakukan pemerintah daerah untuk menyesuaikan kebijakan keuangan mereka dalam kondisi yang tidak pasti (Astuti & Mimba, 2016).
9. **Analisis Efektivitas Strategi Kebijakan APBD dalam Krisis Ekonomi** Studi ini memberikan analisis tentang seberapa efektif strategi kebijakan APBD dalam merespons krisis ekonomi, yang relevan dalam memahami bagaimana kebijakan fiskal lokal dapat mempengaruhi kinerja keuangan daerah di masa krisis seperti pandemi Covid-19 (Hafizi & Amalia, 2022).
10. **Dinamika Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Era Digitalisasi** Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana digitalisasi dan inovasi dalam manajemen keuangan daerah dapat

meningkatkan efisiensi dan transparansi, aspek yang penting dalam konteks mengelola kinerja keuangan daerah di Tanah Bumbu dan Banjarbaru (Wulandari et al., 2023).

Penelitian-penelitian ini memberikan pandangan yang luas dan terperinci tentang berbagai aspek yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah, dari strategi manajemen hingga pengaruh faktor-faktor eksternal seperti pandemi Covid-19, memberikan kerangka yang kuat untuk melanjutkan penelitian dan kebijakan di masa mendatang.

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Pernyataan Kebaruan Ilmiah untuk penelitian mengenai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru sebelum dan sesudah menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan menawarkan perspektif baru yang signifikan dalam konteks administratif dan keuangan daerah. Dalam penelitian sebelumnya, fokus sering kali diberikan pada analisis kinerja keuangan daerah sebelum dan selama pandemi Covid-19, seperti yang dilakukan pada Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Banjarbaru. Penelitian ini akan melihat dampak langsung transformasi status Kota Banjarbaru menjadi ibu kota provinsi terhadap kebijakan keuangan, pendapatan asli daerah (PAD), serta pengelolaan anggaran daerah.

Dalam perbandingan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, studi ini akan memperluas cakupan untuk mempertimbangkan perubahan signifikan dalam dinamika keuangan daerah akibat perubahan status administratif. Misalnya, penelitian sebelumnya cenderung mengevaluasi keefektifan dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah berdasarkan rasio-rasio tertentu seperti kemandirian keuangan, efektivitas PAD, dan efisiensi keuangan daerah. Namun, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana perubahan status Kota Banjarbaru menjadi ibu kota dapat mempengaruhi semua aspek keuangan daerah, termasuk peningkatan atau penurunan pendapatan serta perubahan dalam struktur belanja daerah.

Penelitian terdahulu cenderung memusatkan perhatian pada faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi kinerja keuangan daerah, seperti transparansi, akuntabilitas, dan faktor-faktor ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi. Namun, studi baru ini akan menambah dimensi baru dengan mempertimbangkan implikasi dari status baru Kota Banjarbaru sebagai ibu kota provinsi, yang dapat mempengaruhi dinamika ekonomi lokal, infrastruktur, serta kebijakan fiskal yang lebih luas. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya akan memberikan wawasan mendalam tentang adaptasi kebijakan keuangan daerah terhadap perubahan status administratif, tetapi juga dapat memberikan kontribusi signifikan dalam konteks teori dan praktik manajemen keuangan daerah di Indonesia.

#### **1.5 Tujuan**

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menginvestigasi kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Banjarbaru sebelum dan sesudah perubahan statusnya menjadi Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk secara mendalam memahami perbedaan dan dampak dari transformasi administratif ini terhadap kebijakan keuangan daerah, khususnya dalam hal pendapatan asli daerah (PAD), alokasi anggaran, dan efisiensi pengelolaan keuangan. Melalui analisis komprehensif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang perubahan-

perubahan yang terjadi dalam kinerja keuangan Kota Banjarbaru sebagai respons terhadap perubahan statusnya.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Banjarbaru baik sebelum maupun sesudah menjadi Ibu Kota Provinsi. Faktor-faktor ini dapat mencakup tantangan-tantangan seperti kebijakan fiskal yang kurang fleksibel, perubahan dalam struktur birokrasi, serta dinamika politik lokal yang mempengaruhi pengambilan keputusan keuangan. Dengan memahami faktor-faktor penghambat ini, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk memperbaiki kinerja keuangan daerah dan mengatasi hambatan-hambatan yang diidentifikasi.

Selanjutnya, penelitian ini juga bermaksud untuk mengungkapkan upaya-upaya konkret yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Banjarbaru untuk meningkatkan kinerja keuangan mereka setelah mengalami perubahan status menjadi Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan. Analisis ini akan menggali berbagai inisiatif, program, atau kebijakan yang telah diimplementasikan guna memperbaiki kondisi keuangan daerah, meningkatkan pendapatan, dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya akan memberikan gambaran tentang tantangan-tantangan yang dihadapi, tetapi juga tentang respons yang diambil untuk memperbaiki kinerja keuangan daerah setelah perubahan status administratif yang signifikan.

## **II. METODE**

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena cocok untuk mengeksplorasi dan memahami kompleksitas permasalahan yang berhubungan dengan kinerja keuangan daerah Kota Banjarbaru sebelum dan setelah menjadi Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan. Pendekatan ini memberikan kebebasan untuk mengeksplorasi berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan, seperti kebijakan keuangan daerah, praktik pengelolaan keuangan, dan dinamika sosial-ekonomi yang mempengaruhi keuangan daerah (Murdiyanto, 2020).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang diamati secara sistematis dan terinci. Penulis akan mengumpulkan data melalui observasi langsung dan wawancara mendalam dengan informan yang relevan di Kota Banjarbaru, seperti pejabat di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Data primer akan dikumpulkan dari informan melalui wawancara mendalam dan observasi langsung di lokasi penelitian, sedangkan data sekunder akan diperoleh dari dokumen resmi seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Banjarbaru (L.J Moleong, 2022).

Dalam operasionalisasi konsep, penelitian ini akan memfokuskan analisis pada beberapa aspek kunci kinerja keuangan daerah, seperti derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan daerah, kemandirian keuangan daerah, dan efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD). Analisis rasio keuangan akan menjadi pedoman dalam mengevaluasi kinerja keuangan daerah, dengan

membandingkan data sebelum dan setelah Kota Banjarbaru menjadi Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan (Rijali, 2019).

Sumber data utama penelitian ini adalah informasi dari informan yang memiliki kapasitas dan pengetahuan yang cukup tentang pengelolaan keuangan daerah. Teknik purposive sampling akan digunakan untuk memilih informan yang dapat memberikan informasi yang relevan dan mendalam tentang kondisi keuangan daerah. Data sekunder akan diperoleh dari dokumen-dokumen resmi terkait, seperti APBD dan laporan keuangan lainnya (Hasibuan et al., 2022).

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan daerah Kota Banjarbaru, serta upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja keuangannya pasca menjadi Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan (Sari sasi gendro, 2022).

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Kinerja Keuangan Daerah Kota Banjarbaru**

Kinerja keuangan daerah Kota Banjarbaru dapat dipahami melalui evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terutama pada periode tahun 2019-2023. Evaluasi ini berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Banjarbaru. Menurut Bapak H. Jainudin, S.Sos, M.A.P dalam sebuah wawancara, laporan keuangan Kota Banjarbaru memenuhi standar, mencerminkan aplikasi perencanaan penganggaran yang akhirnya bertanggung jawab pada laporan keuangan. Integritas dalam penyajian laporan keuangan ini penting, yang tercermin dari opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diterima oleh Pemerintah Kota Banjarbaru. Ini menegaskan bahwa proses pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu tolok ukur penting dalam mengevaluasi kinerja keuangan Kota Banjarbaru. PAD mencakup sumber-sumber seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Data dari BPKAD Kota Banjarbaru menunjukkan tren yang menarik dalam lima tahun terakhir, dengan pajak daerah dan lain-lain PAD sah sebagai kontributor utama. Meskipun demikian, terdapat ketidakseimbangan antara PAD dan pendapatan transfer, di mana pendapatan transfer cenderung lebih tinggi dibandingkan PAD.

Kepala BPKAD Kota Banjarbaru menjelaskan bahwa kondisi ini mempengaruhi stabilitas keuangan daerah dalam membiayai program-programnya. Dalam periode yang sulit, seperti saat pandemi COVID-19, pendapatan transfer memainkan peran penting dalam memastikan kelangsungan program-program Kota Banjarbaru. Namun demikian, peran PAD dalam mendukung otonomi daerah masih menjadi tantangan yang harus diatasi untuk mencapai kemandirian keuangan yang lebih besar.

Untuk mengukur kinerja keuangan secara lebih mendalam, rasio derajat desentralisasi menjadi indikator yang penting. Rasio ini mencerminkan kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah,

yang seharusnya meningkat seiring dengan upaya meningkatkan otonomi daerah. Kota Banjarbaru menghadapi tantangan dalam mencapai derajat desentralisasi yang optimal, dengan rasio yang berkisar antara 20,01% hingga 30,00% selama lima tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan pada beberapa tahun tertentu, Kota Banjarbaru belum mencapai tingkat kemandirian finansial yang diharapkan.

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, pengoptimalkan sumber PAD menjadi krusial. Meskipun pajak daerah memberikan kontribusi signifikan, ada potensi besar yang belum dimanfaatkan, terutama dari pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pemerintah Kota Banjarbaru perlu meningkatkan inovasi dalam pengelolaan pajak dan retribusi serta mengidentifikasi potensi baru untuk diversifikasi sumber PAD.

Keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan keuangan daerah juga menjadi fokus penting. Dukungan dari masyarakat dalam pembayaran pajak dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran akan membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. Edukasi terkait pentingnya peran masyarakat dalam pembangunan daerah perlu ditingkatkan untuk memastikan partisipasi yang lebih aktif dan mendukung.

Secara keseluruhan, evaluasi kinerja keuangan daerah Kota Banjarbaru menunjukkan bahwa meskipun ada capaian positif dalam beberapa aspek, masih terdapat tantangan yang harus diatasi. Integritas dalam penyajian laporan keuangan dan transparansi pengelolaan anggaran perlu dipertahankan untuk memastikan kelangsungan dan kemandirian keuangan daerah di masa depan. Dengan mengoptimalkan sumber-sumber PAD dan meningkatkan partisipasi masyarakat, Kota Banjarbaru dapat melangkah menuju keuangan daerah yang lebih stabil dan berkelanjutan.

### **3.2 Faktor yang Menjadi Penghambat Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru Sebelum dan Sesudah Menjadi Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan**

Perjalanan kinerja keuangan Pemerintah Kota Banjarbaru sejak ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan. Salah satu faktor penghambat utama adalah ketergantungan yang tinggi terhadap pendapatan transfer. Sebelumnya, Kota Banjarbaru cenderung bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat untuk mengisi kekurangan anggaran yang ada. Hal ini menciptakan ketergantungan yang berpotensi menghambat kinerja keuangan dalam mengoptimalkan potensi daerahnya. Data selama lima tahun terakhir menunjukkan bahwa pendapatan transfer memainkan peran besar dalam pendapatan daerah, mengindikasikan perlunya upaya lebih lanjut untuk mengurangi ketergantungan ini guna mendorong keberlanjutan keuangan Kota Banjarbaru secara mandiri. Meningkatkan motivasi dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi krusial untuk meraih hasil yang optimal dalam membangun potensi daerah dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan secara lebih efektif.

Di samping ketergantungan terhadap pendapatan transfer, optimasi retribusi daerah menjadi permasalahan kedua yang memengaruhi kinerja keuangan Kota Banjarbaru. Retribusi daerah,

terutama dari sektor kafe yang marak di kota ini, belum memberikan kontribusi optimal dalam pendapatan asli daerah (PAD). Inspeksi mendadak oleh Komisi II DPRD Kota Banjarbaru bersama Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah menemukan bahwa sejumlah kafe tidak memenuhi kewajiban setoran retribusi daerah sesuai dengan transaksi yang sebenarnya. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan dalam pengawasan dan kepatuhan pengelola kafe terhadap aturan retribusi daerah. Ketua Komisi II DPRD, Gusti Rizky, menyoroti perlunya tindakan proaktif dari petugas terkait untuk memastikan setoran retribusi berjalan optimal, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kontribusi retribusi daerah dalam mendukung stabilitas keuangan Kota Banjarbaru dan memaksimalkan pendapatan daerah dari sektor ini.

Secara keseluruhan, mengatasi ketergantungan terhadap pendapatan transfer dan meningkatkan pengelolaan serta kepatuhan terhadap retribusi daerah menjadi kunci dalam meraih kinerja keuangan yang lebih optimal bagi Pemerintah Kota Banjarbaru. Upaya ini tidak hanya mendukung keberlanjutan keuangan daerah namun juga memperkuat kemampuan pemerintah kota untuk menyelenggarakan pemerintahan secara efektif dan efisien dalam konteks menjadi ibu kota provinsi.

### **3.3 Upaya yang Dilakukan Pemerintah untuk Meningkatkan Kinerja Keuangan Kota Banjarbaru Sesudah Menjadi Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan**

Setelah Kota Banjarbaru ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Kota ini gencar melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan keuangan yang dihadapi sebelumnya. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD yang sah. Upaya intensifikasi dilakukan dengan mengoptimalkan penerimaan pajak dari subjek dan objek yang sudah terdaftar, sedangkan ekstensifikasi dilakukan dengan penambahan jumlah wajib pajak yang terdaftar. Menurut Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran, Rendhi Andharta Putra, fokus utama selama lima tahun ini adalah pada pendapatan pajak, namun akan ada peningkatan pada upaya intensifikasi dan ekstensifikasi untuk sumber-sumber pendapatan lainnya guna meningkatkan besaran PAD secara keseluruhan.

Selain itu, Pemerintah Kota Banjarbaru juga melakukan optimalisasi penerimaan retribusi daerah, terutama melalui pemasangan alat "Tapping Box" di sejumlah kafe. Alat ini digunakan untuk memantau secara akurat semua data transaksi yang terjadi, memastikan bahwa retribusi yang dibayarkan sesuai dengan transaksi yang sebenarnya. Menurut Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru, Rudi, meskipun baru sekitar 40 kafe yang terpasang Tapping Box dari total sekitar 300 kafe yang ada, langkah ini merupakan langkah awal yang signifikan dalam mengoptimalkan penerimaan retribusi. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kontribusi retribusi daerah dalam pendapatan asli daerah, serta memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan Kota Banjarbaru dapat berjalan dengan lebih efisien dan mandiri.

Secara keseluruhan, upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pada sumber-sumber PAD serta optimalisasi penerimaan retribusi daerah menjadi strategi kunci Pemerintah Kota Banjarbaru dalam menghadapi tantangan keuangan setelah ditetapkan sebagai ibu kota provinsi. Langkah-langkah ini

tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga untuk membangun fondasi keuangan yang lebih stabil dan berkelanjutan, memungkinkan Kota Banjarbaru untuk lebih kompetitif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa depan.

### **3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Dalam penelitian ini, temuan utama mengungkapkan bahwa Kota Banjarbaru mengalami tantangan signifikan dalam mengelola keuangan daerahnya sebelum dan setelah menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan. Sebelumnya, ketergantungan yang tinggi terhadap pendapatan transfer menjadi salah satu hambatan utama bagi kinerja keuangan daerah. Hal ini mengakibatkan Kota Banjarbaru cenderung bergantung pada dana transfer untuk menutupi defisit anggaran, yang pada gilirannya mempengaruhi kemampuan daerah dalam mengoptimalkan potensi ekonomi dan sumber daya lokalnya.

Namun, setelah Kota Banjarbaru menjadi ibu kota provinsi, terlihat adanya upaya yang signifikan untuk mengatasi permasalahan ini. Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan PAD serta optimalisasi penerimaan retribusi daerah menjadi langkah strategis yang diambil. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah secara keseluruhan dan meminimalkan ketergantungan pada pendapatan transfer. Dengan demikian, pemerintah daerah berupaya untuk menciptakan fondasi keuangan yang lebih kokoh dan mandiri, yang memungkinkan Kota Banjarbaru untuk lebih efektif dalam mengelola penyelenggaraan pemerintahan serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Temuan ini menggambarkan bahwa perubahan status Kota Banjarbaru sebagai ibu kota provinsi telah memberikan dorongan signifikan dalam restrukturisasi keuangan daerah. Meskipun tantangan masih ada, langkah-langkah strategis yang diambil menunjukkan komitmen yang kuat dari pemerintah Kota Banjarbaru untuk menghadapi tantangan tersebut dan mencapai kemandirian keuangan yang lebih baik di masa depan.

### **3.5 Diskusi Temuan Menarik**

Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan menarik yang memberikan wawasan mendalam tentang dinamika keuangan Kota Banjarbaru sebelum dan setelah menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan. Salah satu temuan menarik adalah tentang perubahan strategis dalam pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) setelah Kota Banjarbaru menjadi ibu kota provinsi. Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber PAD, seperti peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar dan optimisasi penerimaan pajak, telah menjadi fokus utama dalam meningkatkan pendapatan daerah. Hal ini menunjukkan respons yang proaktif dari pemerintah daerah dalam mengurangi ketergantungan pada pendapatan transfer dan meningkatkan kemandirian keuangan.

Selain itu, penelitian ini juga mengungkap pentingnya optimalisasi retribusi daerah sebagai sumber pendapatan penting bagi Kota Banjarbaru. Pemasangan alat "Tapping Box" di sejumlah kafe untuk memantau transaksi secara lebih akurat telah dianggap sebagai langkah inovatif dalam meningkatkan penerimaan retribusi. Temuan ini menggarisbawahi upaya konkret pemerintah dalam mengatasi masalah kepatuhan dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Secara keseluruhan, temuan ini tidak hanya memperlihatkan perubahan dalam strategi keuangan Kota Banjarbaru, tetapi juga mencerminkan komitmen untuk mencapai keberlanjutan finansial yang lebih baik serta mengoptimalkan potensi ekonomi lokal secara lebih efektif dalam konteks menjadi ibu kota provinsi.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan, penelitian ini menemukan beberapa kesimpulan penting mengenai kinerja keuangan Kota Banjarbaru sebelum dan setelah menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan. Pertama, perhitungan rasio keuangan menunjukkan bahwa Kota Banjarbaru memiliki kemampuan keuangan yang cukup untuk mendukung operasional pemerintahan daerah, meskipun terdapat ketergantungan yang signifikan pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Hal ini menandakan perlunya upaya lebih lanjut dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), terutama dari sektor pajak dan retribusi.

Faktor-faktor penghambat kinerja keuangan yang diidentifikasi meliputi ketergantungan yang tinggi terhadap pendapatan transfer dan rendahnya penerimaan retribusi daerah. Ketergantungan ini berpotensi mengurangi fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan daerah dan menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih proaktif untuk memperkuat sumber-sumber pendapatan lokal. Upaya seperti intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, serta penggunaan teknologi seperti Tapping Box untuk memantau transaksi retribusi, menjadi langkah strategis yang bisa ditempuh oleh pemerintah Kota Banjarbaru untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

**Keterbatasan Penelitian.** Keterbatasan penelitian ini meliputi beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam menafsirkan hasil. Pertama, keterbatasan dalam akses dan ketersediaan data menjadi kendala utama, terutama dalam memperoleh data primer yang lebih komprehensif dan aktual. Keterbatasan ini mungkin mempengaruhi kedalaman analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan Kota Banjarbaru secara menyeluruh. Selain itu, waktu penelitian yang terbatas juga membatasi cakupan analisis dan eksplorasi terhadap potensi solusi yang lebih mendalam terhadap masalah-masalah yang diidentifikasi. Kendala metodologis, seperti keterbatasan dalam menggunakan metode statistik tertentu untuk mengukur dampak secara lebih akurat, juga perlu dipertimbangkan dalam mengevaluasi kekuatan temuan penelitian ini. Dengan memahami keterbatasan-keterbatasan tersebut, hasil penelitian ini sebaiknya diinterpretasikan dengan mempertimbangkan konteks dan kondisi spesifik Kota Banjarbaru, serta dapat menjadi landasan untuk penelitian lebih lanjut yang lebih mendalam dan luas.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Untuk penelitian masa depan, penting untuk mempertimbangkan beberapa arah yang dapat dieksplorasi lebih lanjut guna meningkatkan pemahaman terhadap kinerja keuangan Kota Banjarbaru. Pertama, penelitian lebih lanjut dapat difokuskan pada mendalami dampak dan strategi untuk mengurangi ketergantungan terhadap pendapatan transfer, dengan menganalisis kebijakan dan praktik terbaik dari daerah lain yang berhasil

mandiri secara finansial. Selain itu, perlu juga untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai potensi untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan retribusi daerah melalui teknologi dan kebijakan yang lebih canggih, seperti penggunaan sistem elektronik untuk pengawasan dan penagihan retribusi. Di samping itu, penelitian yang melibatkan perbandingan dengan daerah-daerah lain yang memiliki karakteristik serupa juga dapat memberikan perspektif yang lebih luas dalam memahami tantangan dan peluang yang dihadapi Kota Banjarbaru dalam meningkatkan kinerja keuangannya. Dengan mengarahkan penelitian pada aspek-aspek ini, diharapkan hasilnya dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam mendukung upaya pemerintah Kota Banjarbaru untuk mencapai kemandirian finansial yang lebih baik dan berkelanjutan.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk terlibat dalam penelitian ini. Saya ingin menyampaikan penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan wawasan selama proses penelitian. Tanpa kerjasama dan kontribusi dari berbagai pihak, penelitian ini tidak akan terwujud dengan baik. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan kebijakan dan penataan tenaga kerja di masa mendatang. Terima kasih atas waktu, dukungan, dan kerja sama yang telah diberikan. Semoga kita dapat terus berkolaborasi untuk mencapai tujuan yang lebih baik.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Amin Insani, Rahayu, S., & Misni Erwati. (2023). DETERMINAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1). <https://doi.org/10.29303/akurasi.v6i1.343>
- Antari, N. P. G. S., & Sedana, I. B. P. (2018). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 7(2). <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2018.v7.i02.p19>
- Astiti, D. N. Y., & Mimba, N. P. S. H. (2016). Pengaruh Belanja Rutin dan Belanja Modal pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(3).
- Fatimah, S. (2018). PENGARUH KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DAN KOMPETENSI PROFESIONAL GURU DALAM MENINGKATKAN KINERJA GURU PADA SMPN 4 BANJARBARU. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 4(1). <https://doi.org/10.35972/jieb.v4i1.185>
- Hafizi, R., & Amalia, F. A. (2022). Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 5(2). <https://doi.org/10.18196/jati.v5i2.14194>
- Hasibuan, S., Rodliyah, I., Thalbah, S. Z., Ratnaningsih, P. W., & E, A. A. M. S. (2022). Media penelitian kualitatif. In *Jurnal EQUILIBRIUM* (Vol. 5, Issue January).
- Jumiati, & Humaidi, M. (2019). Strategi Pemasaran Pada Lembaga Bimbingan Belajar Go Smart Banjarbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 5.
- L.J Moleong. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In *Rake Sarasin* (Issue Maret).

- Murdiyanto, E. (2020). Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif). In *Yogyakarta Press*.
- Nurarifah, R., Afrizal, A., & L, T. A. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Merangin. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 7(2). <https://doi.org/10.22437/jaku.v7i2.16245>
- Nurhaeda, A., & Tenriola, A. (2022). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai. *Tangible Journal*, 7(2). <https://doi.org/10.53654/tangible.v7i2.304>
- Pradana, E. Y., & Handayani, N. (2023). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan (JIAKu)*, 2(2). <https://doi.org/10.24034/jiaku.v2i2.5979>
- Putri, N. K. N. I., & Darmayanti, N. P. A. (2019). PENGARUH PAD DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI WILAYAH SARBAGITA PROVINSI BALI. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 8(5). <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2019.v08.i05.p09>
- Rijali, A. (2019). ANALISIS DATA KUALITATIF. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33). <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Rizal, M., & Paujiah, S. (2018). STRATEGI PEMASARAN PADA LEMBAGA BIMBINGAN BELAJAR GO SMART BANJARBARU. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 4(1). <https://doi.org/10.35972/jieb.v4i1.191>
- Rizkyaturraudah, & Syahdan, S. A. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sebelum dan Selama Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Banjarbaru Tahun 2018-2021). In *Journal of UKMC National Seminar on Accounting Proceeding* (Vol. 2, Issue 1).
- Sari sasi gendro, dea aulya. (2022). Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. In *LP2M UST Jogja* (Issue March).
- Wulandari, R., Lestari, B. A. H., & Suryantara, A. B. (2023). ANALISIS RASIO KEUANGAN DALAM MENGUKUR KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA MATARAM. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 3(2). <https://doi.org/10.29303/risma.v3i2.657>